

EVALUASI MEKANISME PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Nama Mahasiswa : Fiska Rianasari
NIM : 5304171068
Dosen Pembimbing : Husni Mubarak, M.Acc

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan, pengelolaan, efektifitas dan faktor yang mempengaruhi Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai upaya peningkatan PAD Kabupaten Bengkulu. Hasil penelitian adalah mekanisme pengelolaan retribusi izin usaha perikanan di Kabupaten Bengkulu terkendala pada proses legalitas atau pengurusan izin cukup memakan waktu yang lama, karena terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan diurus pada instansi yang berbeda, sejak tahun 2016-2019 retribusi izin usaha perikanan dikategorikan tidak efektif sedangkan di tahun 2020 dikategorikan sangat efektif dengan pencapaian 100,21% dengan realisasi mencapai Rp. 288.600.000,-. Permasalahan rendahnya penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan, yaitu lahan usaha budidaya perikanan yang merupakan lahan gambut dan/atau hutan alam primer serta termasuk HPT, besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan izin usaha, kurangnya pemahaman pelaku usaha tambak udang terhadap peraturan pengurusan SIUP, pelaku usaha belum memahami proses PIPPIB hutan alam primer dan lahan gambut, serta tidak adanya tindakan hukum kepada pelaku usaha yang tidak memiliki SIUP.

Kata Kunci : Pengelolaan, Legalitas, Budidaya Tambak Udang, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Pendapatan Asli Daerah.

**EVALUATION OF THE MECHANISM FOR
MANAGING RETRIBUTION FOR FISHERY BUSINESS
PERMITS AS AN EFFORT TO INCREASING THE
LOCAL REVENUE OF BENGKALIS REGENCY**

Author Name : Fiska Rianasari
Stident of Number : 5304171068
Supervisor : Husni Mubarak, M.Acc

ABSTRACT

This study aims to determine the acceptance, management, efectiviness and factors that affect the fisheries business permit retribution as an effort to increase locally-generated revenue in Bengkalis regency. The results of this research is that the mechanism for managing levies for fisheries business permits in Bengkalis Regency is constrained by the legality process or permits processing which takes a long time, because there are several requirements that must be met and sent to different agencies, ineffective while in 2020 it was categoriez as very effective with an achievement of 100,21% with the realization reaching Rp. 288.000.00,-. The problem is the low receipt of retribution for fisheries business permits, namely aquaculture business land which is peat land and/or primary natura forest and includes HPT, the amount of cost that must be incurred to obtain a business license, the lack of understanding of shrimp farming business actors towards regulations management of SIUP, business actors do not understand the PIPPIB process for primary natural forests and peatlands, and there is no legal action against business actors who do not have SIUP.

Keywords: *Management, Legality, Shrimp Pond Cultivation, Fishing Business License Retribution, Locally-Generated Revenue*